Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Evaluasi Program Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce*, *Reuse*, *Recycle* Sebagai Upaya Peningkatan Lingkungan Berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo

Natasya Amalia Putri Iswyanto[1], Indah Murti[2], Anggraeny Puspaningtyas[3]

[123] Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:
Received Desember, 2025
Revised Desember, 2025
Accepted Desember, 2025
Available Desember, 2025

natasya8124@gmail.com,
endah@untag-sby.ac.id
anggraenypuspa@untag-sby.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

A B S T R A K

Isu permasalahan sampah di Kabupaten Sidoarjo masih terus diperbincangkan hingga saat ini karena seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan aktivitas permukiman. Dalam kondisi tersebut, TPS3R menjadi langkah strategis yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk menekan jumlah sampah sejak dari sumbernya melalui penerapan prinsip *reduce*, *reuse*, dan *recycle*. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R) di Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan teori evaluasi CIPP *(Context, Input, Process, Product)* dari Stufflebeam. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program TPS3R di Desa Kureksari dan Desa Kalanganyar sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih terkendala oleh sarana prasarana yang belum merata, perbedaan kapasitas SDM, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan dari sumber. Proses pengelolaan sampah telah berjalan sesuai prosedur, tetapi efektivitasnya belum optimal karena sosialisasi yang tidak berkelanjutan dan masih adanya TPS3R yang bergantung pada TPA untuk mengolah residu. Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Daerah dapat meningkatkan sosialisasi yang melibatkan langsung masyarakat sehingga partisipasi dalam pemilahan sampah dapat meningkat dan mendukung keberlanjutan program TPS3R.

Kata Kunci: Evaluasi, Pengelolaan Sampah, TPS3R, Kabupaten Sidoarjo

A B S T R A C T

The issue of waste management in Sidoarjo Regency continues to be discussed to this day due to increasing population growth and residential activities. In this condition, TPS3R (Reduce, Reuse, Recycle) is a strategic step undertaken by the Regional Government to reduce the amount of waste from its source through the application of the principles of reduce, reuse, and recycle. This study aims to evaluate the Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) Waste Management Facility program in Sidoarjo Regency using the CIPP (Context, Input, Process, Product) evaluation theory from Stufflebeam. This study was conducted with a descriptive qualitative approach, using data collection techniques in the form of interviews, observation, and documentation. The results show that the TPS3R program in Kureksari Village and Kalanganyar Village is in accordance with the needs of the community. However, its implementation is still hampered by uneven

*Corresponding author
E-mail addresses: natasya8124@gmail.com

infrastructure, differences in human resource capacity, and low community participation in sorting at the source. The waste management process has been carried out according to procedures, but its effectiveness is not optimal due to unsustainable socialization and the continued reliance of TPS3R on landfills to process residues. This study recommends that the Regional Government can increase socialization that directly involves the community so that participation in waste sorting can increase and support the sustainability of the TPS3R program.
***Keywords**: Evaluation; Waste Management; TPS3R; Sidoarjo Regency*

1. PENDAHULUAN

Permasalahan sampah di Kabupaten Sidoarjo terus menjadi isu yang mendesak untuk ditangani. Secara nasional, kondisi pengelolaan sampah memang berada pada situasi yang mengkhawatirkan, dan Sidoarjo menjadi salah satu daerah dengan beban sampah terbesar. Ketidakterkendalian sampah dapat memicu berbagai dampak lingkungan, seperti banjir, pencemaran, hingga kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sampah yang tidak ditangani dengan benar juga menyebabkan lingkungan kotor, mempercepat proses sedimentasi sungai, dan berpotensi menimbulkan berbagai masalah kesehatan serta menurunkan kualitas sanitasi. Penanganan yang belum optimal baik dari masyarakat maupun pemerintah menjadi salah satu penyebab berbagai persoalan tersebut. Padahal, jika dikelola dengan mengikuti ketentuan perundang-undangan dan didukung berbagai inovasi pengurangan sampah, dampak negatif, tersebut dapat diminimalkan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menegaskan bahwa sampah merupakan sisa aktivitas manusia yang berwujud padat dan harus dikelola melalui pengurangan serta penanganan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir. Pada praktiknya, pengangkutan sampah masih didominasi oleh pemerintah kabupaten atau kota, dengan alur pengelolaan dari TPS menuju TPST hingga TPA. Salah satu pendekatan yang terus didorong adalah penerapan konsep 3R *(Reduce, Reuse,* dan *Recycle)* melalui keberadaan TPS3R. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, tetapi juga mengubah pandangan masyarakat bahwa sampah memiliki nilai ekonomi jika dikelola dan dimanfaatkan dengan tepat. Hal ini sejalan dengan target SDGs, khususnya target 12.5 yang menekankan upaya pencegahan, pengurangan, dan daur ulang sampah. Menurut *Plastic Smart Cities* WWF Indonesia, TPS3R dipandang sebagai pendekatan yang inovatif dan berkelanjutan dalam mengelola sampah di level komunitas. Dengan menerapkan prinsip 3R, keberadaan TPS3R mampu menurunkan beban yang harus ditangani di TPA, mengurangi berbagai dampak lingkungan, sekaligus memberdayakan masyarakat. Meskipun dalam pelaksanaannya menghadapi beberapa tantangan, manfaat jangka panjang yang diberikan bagi lingkungan maupun komunitas sangat signifikan. Melalui kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, TPS3R berpotensi menjadi model yang pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkualitas (PSC WWF Indonesia, 2024).

Berdasarkan laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Provinsi Jawa Timur memproduksi sekitar 4 juta ton sampah pada tahun 2024. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Sidoarjo tercatat sebagai daerah dengan timbulan sampah terbesar kedua di Jawa Timur dengan menyumbang sebanyak 313.401 ton pada tahun yang sama. Isu permasalahan sampah di Kabupaten Sidoarjo masih terus diperbincangkan hingga saat ini. Faktor penyebab yang paling menonjol adalah masih seringnya sungai dimanfaatkan masyarakat sebagai lokasi pembuangan sampah yang kemudian menyebabkan penumpukan sampah yang sulit untuk ditangani.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

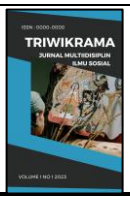


Gambar 1.1 Gunungan Sampah di TPA Jabon Sidoarjo Capai 15 Meter
Sumber: Web Detik Jatim, 2025

Dikutip dari berita Detik Jatim, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Griyo Mulyo Jabon, Kabupaten Sidoarjo, setiap harinya menerima rata-rata 570 ton sampah yang didominasi oleh sampah rumah tangga. Besarnya volume ini diperparah oleh komposisi sampah yang masuk, di mana sekitar 40% merupakan sampah organik bernilai rendah dan anorganik yang sulit didaur ulang. Kondisi gunungan sampah tersebut menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah dari hulu ke hilir belum berjalan optimal. Pemilahan sampah pada tingkat rumah tangga masih belum optimal, sehingga tekanan paling signifikan dalam proses pengelolaan akhirnya terpusat pada TPA. Hal ini dikarenakan pengelolaan sampah masih sering dipersepsikan masyarakat sebagai tugas yang sepenuhnya harus dilakukan oleh petugas kebersihan. Padahal, masyarakat juga memegang kontribusi besar dalam upaya menekan volume sampah yang dihasilkan. “Seluas apa pun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang dimiliki pemerintah, sebesar apa pun anggaran yang dialokasikan, dan sebanyak apa pun program yang dirancang, semua akan menjadi tidak efektif tanpa partisipasi aktif dari masyarakat. Tanpa keterlibatan masyarakat, permasalahan sampah tidak akan pernah terselesaikan” (Pardosi et al., 2019).

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah strategis, antara lain melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah yang mengedepankan prinsip 3R *(reduce, reuse, recycle)* atau dikenal sebagai TPS3R. Upaya memperkuat pengelolaan sampah agar lebih efektif, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menetapkan Perbup Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Kebijakan ini mengusung strategi pengurangan timbulan sampah melalui tiga pendekatan utama, yaitu pembatasan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali. Pada tahun 2024, sistem pengelolaan sampah yang mengedepankan prinsip 3R di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan capaian sebesar 79%. Angka ini menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan dalam upaya pengurangan timbulan sampah dari sumbernya, sejalan dengan target yang

*Corresponding author
E-mail addresses: natasya8124@gmail.com



ditetapkan dalam Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Kabupaten Sidoarjo yakni pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sebesar 70% sebelum mencapai Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jabon pada tahun 2025. Berdasarkan data Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Sidoarjo Tahun 2024, "persentase pengurangan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) pada tahun 2024 mencapai 33%, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 29%. Namun demikian, capaian penanganan sampah di TPA baru mencapai 46%, masih berada di bawah target sebesar 53%" (LKPJ, 2024). Meskipun terjadi peningkatan kinerja secara kuantitatif, berdasarkan kondisi di lapangan, implementasinya belum sepenuhnya optimal khususnya dalam mendorong peran aktif masyarakat dan efektivitas pengelolaan di TPS3R.

Implementasi program tempat pengelolaan sampah yang didasari oleh temuan penelitian (Baskoro & Kurniawan, 2021) yang menunjukkan bahwa implementasinya masih jauh dari memuaskan dan belum mencapai hasil yang optimal. Ketidaktepatan jadwal pengambilan sampah membuat program tersebut dinilai kurang baik oleh masyarakat, karena sampah tidak dapat terangkut secara rutin dan kondisi lingkungan menjadi semakin menurun. Kinerja petugas pengangkut sampah juga dinilai belum maksimal, mengingat jadwal pengambilan yang seharusnya dilakukan dua kali seminggu tidak dijalankan dengan disiplin. Dalam praktiknya, petugas hanya data sekali seminggu atau bahkan setiap sepuluh hari, sehingga sampah warga menumpuk dan menimbulkan berbagai dampak negatif. Permasalahan serupa juga terlihat dalam penelitian (Suryani, 2022) yang menemukan bahwa proses pengangkutan sampah masih menggabungkan antara sampah organik dan non organik. Hal ini disebabkan oleh masyarakat yang cenderung malas saat memilah. Rendahnya kesadaran dan kemauan masyarakat dalam melakukan pemilahan sejak dari sumbernya turut memperburuk efektivitas sistem pengelolaan sampah.

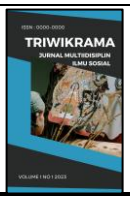
Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut melalui sebuah penelitian yang berjudul "Evaluasi Pelaksanaan Program Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* Sebagai Upaya Peningkatan Lingkungan Berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo". Dalam rangka mengevaluasi Program TPS3R di Kabupaten Sidoarjo, peneliti memilih untuk mengambil lokasi di Desa Kureksari, Kecamatan Waru, dan Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati. Pemilihan kedua desa ini didasarkan dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang dimiliki oleh masing-masing desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Federick sebagaimana dikutip (Agustino, 2008) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang terpenting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. Menurut Anderson dalam (Tahir, 2014) kebijakan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu substantif dan prosedural. Kebijakan substantif berisi mengenai apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, sedangkan kebijakan prosedural menjelaskan siapa yang berwenang serta bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan. Dengan demikian, kebijakan publik merupakan rangkaian keputusan yang dirumuskan oleh lembaga dan pejabat pemerintah. Kebijakan publik mencakup seluruh tindakan yang dirancang serta dijalankan oleh pemerintah, yang efeknya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Kebijakan publik juga dapat dipahami sebagai rancangan arah tindakan atau strategi yang diajukan oleh individu, kelompok, maupun pemerintah untuk mengatasi suatu permasalahan atau memanfaatkan peluang dalam konteks tertentu demi mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan.

Evaluasi Kebijakan Publik

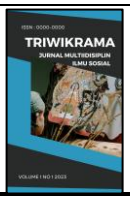
William Dun mengartikan bahwa evaluasi adalah melakukan penaksiran *(appraisal)*, memberi skor *(rating)*, dan menilai *(assessment)*, segala hal yang berhubungan dengan cara untuk memproduksi dan melakukan analisis informasi berkaitan dengan nilai dan manfaat dari kebijakan (Hayat, 2019). Sedangkan, (Stufflebeam, 1985) mendefinisikan evaluasi sebagai proses menilai dan menganalisis nilai atau manfaat yang berkaitan dengan hasil suatu kebijakan. Evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana program atau kebijakan telah dilaksanakan dan apakah pelaksanaannya mencapai keberhasilan atau justru tidak sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Proses ini juga mencakup pengumpulan data terkait kebijakan serta penilaian terhadap fakta tersebut dengan membandingkannya pada standar yang telah ditentukan. Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan menelaah dan menilai pelaksanaan kebijakan, baik selama proses berlangsung maupun setelah kegiatan selesai, guna menentukan apakah kebijakan tersebut perlu diteruskan, dilanjutkan dengan perbaikan tertentu, atau dihentikan (Prabowo et al., 2022). Berdasarkan penjelasan tersebut, evaluasi kebijakan dapat diartikan sebagai suatu usaha menganalisis untuk memastikan kebenaran dan ketepatan suatu program yang dibuat oleh pihak berwenang melalui kajian terhadap substansi, pelaksanaan, dan dampak kebijakan sehingga mampu menyediakan informasi yang objektif dan valid mengenai capaian suatu program atau kebijakan.

Evaluasi CIPP

Evaluasi program menurut Cronbach dan Stufflebeam adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan dan menegaskan bahwa meskipun evaluator menyediakan informasi, evaluator bukanlah pengambil keputusan tentang suatu program (Cronbach, 1982). Konsep evaluasi model CIPP pertama kali dikenalkan oleh Stufflebeam dan Shinfield (1985) dalam (Asyraf et al., 2022) pada 1965 sebagai hasil usahanya mengevaluasi ESEA (*the Elementary and Secondary Education Act*). Evaluasi model Stufflebeam terdiri dari empat dimensi, yaitu: *Context, Input, Process*, dan *Product*, sehingga model evaluasinya diberi nama CIPP. Keempat kata tersebut disingkat dengan CIPP dan merupakan sasaran evaluasi, yaitu komponen dan proses sebuah program kegiatan. Bentuk keempat komponen tersebut meliputi:

*Corresponding author
E-mail addresses: natasya8124@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



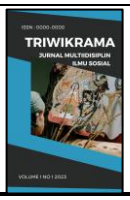
evaluasi konteks (*context evaluation*), evaluasi masukan (*input evaluation*), evaluasi proses (*process evaluation*), dan evaluasi hasil (*product evaluation*). Keunggulan model CIPP yaitu memberikan suatu format evaluasi yang dilakukan secara komprehensif, untuk memahami aktivitas-aktivitas program mulai dari munculnya ide program sampai pada hasil yang dicapai setelah program dilaksanakan.

a. Evaluasi *Context*
   Stufflebeam & Shinkfield (1985) dalam (Asyraf et al., 2022) menjelaskan bahwa evaluasi *context* berusaha mengevaluasi status objek secara keseluruhan, mengidentifikasi kekurangan, kekuatan, mendiagnosa masalah, dan memberikan solusinya, menguji apakah tujuan dan prioritas disesuaikan dengan kebutuhan yang akan dilaksanakan. Evaluasi *context* berada pada level perencanaan, mencakup analisis masalah yang berkaitan dengan lingkungan program atau kondisi obyektif yang akan dilaksanakan. Evaluasi *context* akan membantu pengambil kebijakan merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan program dan merumuskan tujuan program.
b. Evaluasi *Input*
   Evaluasi *input* membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Menurut Stufflebeam & Shinkfield (1985) dalam (Asyraf et al., 2022) orientasi utama evaluasi input adalah menentukan cara bagaimana tujuan program dicapai.
c. Evaluasi *Process*
   Menurut Stufflebeam dan Shinkfield (1985) dalam (Asyraf et al., 2022), evaluasi *process* adalah memeriksa pelaksanaan suatu rencana atau program. Evaluasi *process* digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program, dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi.
d. Evaluasi *Product*
   Stufflebeam dan Shinkfield (1985) dalam (Asyraf et al., 2022) menjelaskan bahwa tujuan dari evaluasi *product* adalah untuk mengukur, menafsirkan, dan menetapkan pencapaian hasil dari suatu program, memastikan seberapa besar program telah memenuhi kebutuhan suatu kelompok program yang dilayani. Dapat diketahui bahwa evaluasi produk merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Data yang dihasilkan akan sangat menentukan apakah program diteruskan, dimodifikasi atau dihentikan. Model CIPP saat ini disempurnakan dengan satu komponen O, singkatan dari *outcome*, sehingga menjadi model CIPPO. Bila model CIPP berhenti pada mengukur *output*, sedangkan CIPPO sampai pada implementasi dari *output*.

Pengelolaan Sampah

Sampah merupakan barang atau material yang sudah tidak dimanfaatkan oleh manusia atau berupa sisa benda padat yang tidak lagi diperlukan dalam aktivitas manusia sehingga kemudian dibuang. Sampah padat adalah objek atau bahan yang tidak dipakai, tidak dimanfaatkan, tidak diinginkan, atau dibuang sebagai hasil dari aktivitas manusia dan tidak muncul secara alami tanpa

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



adanya campur tangan manusia (Dermawan, 2012). Sedangkan, menurut (Suryani, 2014) merupakan material sisa yang tidak digunakan setelah berakhirnya suatu proses, dimana tumpukan sampah yang ada selama ini berasal dari berbagai sumber seperti pasar, pertokoan, restoran, perumahan, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Mekanisme pengelolaan sampah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, meliputi kegiatan-kegiatan berikut:

1) Pengurangan sampah, yaitu kegiatan untuk mengatasi timbulnya sampah sejak dari produsen sampah (rumah tangga, pasar, dan lainnya), menggunakan ulang sampah dari sumbernya dan di tempat pengolahan, dan daur ulang sampah di sumbernya dan atau di tempat pengolahan.
2) Penanganan sampah, yaitu rangkaian kegiatan penanganan sampah yang cukup pemilahan (pengelompokan dan pemisahan sampah menurut jenis dan sifatnya), Pengangkutan (memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu), pengangkutan (kegiatan memindahkan sampah dari sumber, TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu, pengolahan hasil akhir (mengubah bentuk, komposisi, karakteristik, dan jumlah sampah agar diproses lebih lanjut), dimanfaatkan atau dikembalikan alam dan pemrosesan akhir kegiatan pengolahan sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya agar dapat dikembalikan ke media lingkungan.

Kebijakan pengelolaan sampah menurut Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Kegiatan pengurangan sampah meliputi:

1) Pembatasan timbulan sampah *(reduce)*;
2) Pendaur ulang sampah *(reuse)*, dan;
3) Pemanfaatan kembali sampah *(recycle)*.

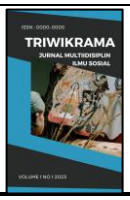
Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemprosesan, pendaur-ulangan atau pembuangan dari material sampah. Kalimat tersebut biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan atau keindahan. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumberdaya alam.

Lingkungan Berkelanjutan

Secara lebih rinci, lingkungan berkelanjutan dapat dipahami sebagai suatu keadaan yang stabil, tangguh, dan saling berkaitan yang memungkinkan manusia memenuhi kebutuhannya tanpa melampaui kemampuan ekosistem untuk mendukung serta memulihkan dirinya, sehingga tetap mampu memenuhi kebutuhan generasi pada masa mendatang. Upaya mewujudkan keberlanjutan lingkungan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan, baik pada masa sekarang maupun di masa depan, dengan memperhatikan tidak hanya aspek ekologis tetapi juga aspek sosial dan ekonomi. Ketiga aspek tersebut, yaitu ekologi, sosial, dan ekonomi, perlu diintegrasikan secara selaras agar keberlanjutan lingkungan dapat tercapai (Effendi et al., 2018).

*Corresponding author
E-mail addresses: natasya8124@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



2. METODE

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Moleong yang dikutip oleh (Herdiansyah, 2014) berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan sebagai metode untuk menangkap dan memberikan gambaran terhadap suatu fenomena, sebagai metode untuk mengeksplorasi fenomena dan sebagai metode untuk memberikan penejelasan dari suatu fenomena yang diteliti. Sehingga pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan maksud untuk mendapatkan data dan mengumpulkan informasi yang selengkap mungkin untuk mendeskripsikan mengenai evaluasi pelaksanaan program tempat pengelolaan sampah *reduce, reuse, recycle* sebagai upaya peningkatan lingkungan berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam rangka mengevaluasi Program TPS3R di Kabupaten Sidoarjo, peneliti memilih untuk mengambil lokasi di Desa Kureksari, Kecamatan Waru, dan Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati. Pemilihan kedua desa ini didasarkan dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang dimiliki oleh masing-masing desa.

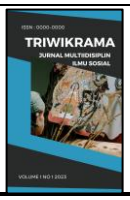
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 3 metode utama yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, TPS3R Mekarsari, TPS3R KSM Sopo Nyongko, serta lingkungan masyarakat untuk mengetahui kondisi aktual pengelolaan sampah rumah tangga, keterlibatan masyarakat, serta sarana dan prasarana yang tersedia. Wawancara dilakukan secara langsung melalui tatap muka antara pewawancara dan narasumber guna memperoleh informasi yang konkret dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, meliputi pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, Kepala Desa Kureksari, Kepala Desa Kalanganyar, Pengelola TPS3R Mekarsari, Pengelola TPS3R KSM Sopo Nyongko, serta masyarakat. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi yang akan dianalisa mencakup arsip, laporan kebijakan, serta catatan kegiatan TPS3R yang relevan dengan penelitian.

Untuk mengkaji mengenai data yang diperoleh melalui penelitian ini, maka analisa yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis Model Miles and Huberman dalam (Sugiyono, 2018), yakni aktivitas dalam analisis data terdapat 4 (empat) yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan ini akan dilakukan pengumpulan data yang ditujukan untuk menemukan jawaban atas fokus penelitian ini, dilakukan wawancara langsung dengan Kasi Bidang Pengelolaan Persampahan, Perangkat Desa, dan Pengelola TPS3R mengenai fokus penelitian ini, dalam mengevaluasi program TPS3R yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peneliti menggunakan teori evaluasi model CIPP (Stufflebeam) yang terdapat empat kriteria yaitu *Context, Input, Process,* dan *Product*.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



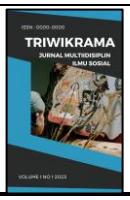
1) Context

Evaluasi *Context* menurut Stufflebeam dan Shinkfield (1985) dalam (Asyraf et al., 2022) bertujuan untuk mengevaluasi status objek secara keseluruhan, mengidentifikasi kekurangan, kekuatan, mendiagnosa masalah, dan memberikan solusinya, menguji apakah tujuan dan prioritas disesuaikan dengan kebutuhan yang akan dilaksanakan. Dalam program TPS3R di Kabupaten Sidoarjo, evaluasi konteks memiliki peran penting dalam memahami alasan program dibentuk, dasar hukum yang mendasarinya, serta tujuan yang ingin dicapai dalam mewujudkan lingkungan berkelanjutan di tingkat desa. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, peningkatan volume sampah rumah tangga setiap hari dan terbatasnya kapasitas TPA Jabon menjadi faktor utama yang mendorong perlunya sistem pengelolaan sampah yang lebih optimal. Di beberapa desa, seperti Kalanganyar dan Kureksari, masyarakat sebelumnya masih membuang sampah di tepi jalan, aliran sungai, atau lahan kosong karena belum tersedia fasilitas pengolahan sampah yang memadai. Situasi tersebut menyebabkan pencemaran lingkungan sekaligus menunjukkan adanya kebutuhan terhadap sarana yang dapat mendukung proses pemilahan dan pengurangan sampah sejak dari sumbernya. Penyelenggaraan TPS3R memiliki landasan hukum yang kuat karena didukung oleh berbagai regulasi nasional, mulai dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengenai Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga, hingga Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 yang mengatur kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menindaklanjuti aturan-aturan tersebut melalui Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2019 terkait pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, serta memasukkan program TPS3R ke dalam RPJMD sebagai salah satu target kinerja pemerintah daerah. Setiap TPS3R juga memiliki Surat Keputusan Pengelola sebagai dasar legalitas operasional di tingkat desa. Namun, belum adanya peraturan desa khusus yang mengatur pengelolaan sampah menyebabkan mekanisme partisipasi masyarakat dan dukungan pendanaan belum tersusun secara sistematis.

Hasil pengamatan di Desa Kalanganyar dan Desa Kureksari menunjukkan bahwa tujuan pelaksanaan program TPS3R berfokus pada upaya mengurangi volume sampah yang dibawa ke TPA, menciptakan lingkungan permukiman yang lebih terjaga kebersihannya, serta mendorong masyarakat melakukan pemilahan dan pengolahan sampah sesuai prinsip 3R. Program ini juga memiliki tujuan ekonomi dengan memanfaatkan sebagian jenis sampah sebagai sumber pendapatan tambahan, sekaligus meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan. Secara keseluruhan, hasil evaluasi konteks menunjukkan bahwa program TPS3R di Kabupaten Sidoarjo muncul dari kebutuhan lingkungan yang mendesak, memperoleh dukungan regulatif yang jelas, serta menetapkan sasaran pengurangan sampah dan peningkatan kualitas lingkungan yang selaras dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat. Walaupun demikian, penguatan regulasi di tingkat desa masih dibutuhkan agar pelaksanaan program dapat berlangsung lebih konsisten dan berkesinambungan.

*Corresponding author
E-mail addresses: natasya8124@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

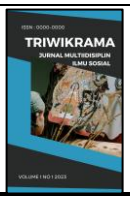


2) Input

Menurut Stufflebeam dan Shinkfield (1985) dalam (Asyraf et al., 2022), evaluasi *input* bertujuan untuk menilai sejauh mana sumber daya, strategi, dan perencanaan yang dimiliki suatu program mampu mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini menitikberatkan pada kecukupan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta pembiayaan operasional sebagai unsur utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program. Pada pelaksanaan TPS3R di Kabupaten Sidoarjo, evaluasi ini meliputi mengidentifikasi penggunaan sarana prasarana, kualitas serta jumlah sumber daya manusia, dan dukungan pendanaan yang dimiliki masing-masing desa untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkesinambungan. Ketersediaan sarana dan prasarana menjadi elemen yang sangat menentukan dalam berjalannya program. Temuan lapangan menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas TPS3R berada pada kewenangan pemerintah desa sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019. Hal tersebut menyebabkan tiap desa memiliki kapasitas yang berbeda dalam menyediakan bangunan TPS3R, armada pengangkut, mesin pencacah, konveyor, hingga alat pembakar. Selain menggunakan alokasi anggaran desa, beberapa TPS3R juga menerima bantuan dari berbagai pihak, seperti partai politik, pokok pikiran DPRD, serta program *Corporate Social Responsibility* (CSR). TPS3R Mekarsari, misalnya, memperoleh mesin pembakar dan konveyor melalui dukungan PKS dan pokir DPRD, sedangkan TPS3R KSM Sopo Nyongko menerima bantuan yang lebih besar dari CSR PT Atina dan PT Pertamina Patra Niaga berupa pembangunan kantor, gazebo, PLTS, biodigester, serta mesin pencacah organik. Secara keseluruhan, fasilitas utama pada kedua TPS3R berada dalam kondisi layak dan menunjang kegiatan pengelolaan sampah sehari-hari. Dalam hal sumber daya manusia, struktur organisasi dan jumlah pekerja di setiap TPS3R disesuaikan dengan kebutuhan operasional masing-masing. TPS3R Mekarsari memiliki kurang lebih 65 tenaga kerja dengan pembagian tugas yang terstruktur antara pengurus, petugas pemilah, serta penggeledek, sehingga alur kegiatan mulai dari pengumpulan hingga pengolahan sampah dapat berjalan optimal. Di sisi lain, TPS3R KSM Sopo Nyongko mempekerjakan 12 orang dengan susunan organisasi yang lebih sederhana, di mana beberapa posisi manajerial masih harus merangkap tugas teknis. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas operasional TPS3R sangat dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja, kejelasan pembagian peran, dan sistem manajemen yang digunakan.

Pembiayaan menjadi faktor penting lain dalam evaluasi *input*. Biaya operasional mencakup pengeluaran untuk listrik, bahan bakar armada, perawatan alat, serta pemberian upah pekerja. Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 116 Tahun 2022, besaran iuran masyarakat ditetapkan antara Rp 25.000 hingga Rp 35.000 per bulan sebagai sumber utama pembiayaan operasional TPS3R. Di TPS3R KSM Sopo Nyongko, pendanaan berasal dari iuran sebesar Rp 30.000 serta pendapatan penjualan sampah terpilah sekitar Rp 8.000.000 setiap bulan, namun belum mampu menutupi seluruh kebutuhan sehingga masih memerlukan dukungan anggaran desa. Berbeda dengan itu, TPS3R Mekarsari mengandalkan iuran Rp 35.000 dan pendapatan penjualan sampah sekitar Rp 15.000.000 setiap bulan tanpa tambahan anggaran desa. Meski demikian, TPS3R Mekarsari masih harus membayar biaya retribusi untuk pembuangan residu ke TPA, sehingga beban

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



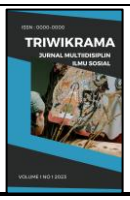
operasional tetap tinggi. Variasi kemampuan pembiayaan antar TPS3R menegaskan bahwa keberlanjutan operasional sangat dipengaruhi oleh jumlah iuran yang masuk, optimalisasi hasil penjualan sampah, serta besarnya kebutuhan operasional yang harus dipenuhi setiap bulan. Secara keseluruhan, hasil evaluasi *input* menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan program TPS3R di Kabupaten Sidoarjo sangat bergantung pada kecukupan sarana prasarana, kapasitas sumber daya manusia, dan kestabilan pendanaan operasional. Ketiga aspek tersebut menjadi unsur utama dalam menjaga efektivitas program dan memastikan keberlangsungan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

3) Process

Menurut Stufflebeam dan Shinkfield (1985) dalam (Asyraf et al., 2022), evaluasi *process* bertujuan untuk melihat sejauh mana suatu program dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Melalui evaluasi proses, dapat diketahui apakah kegiatan sudah berjalan sesuai tujuan, bagaimana partisipasi pelaksana dan masyarakat, serta sejauh mana hasil pelaksanaan program dapat mendukung keberlanjutan. Program TPS3R di Kabupaten Sidoarjo, evaluasi proses difokuskan pada pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah, pembinaan sumber daya manusia, dan mekanisme pemeliharaan sarana prasarana guna menunjang keberlanjutan lingkungan. Pengelolaan sampah di TPS3R dilakukan melalui tahapan pengangkutan dan pemilahan. Pengangkutan dilaksanakan berdasarkan jadwal dan rute yang telah ditetapkan sehingga aliran sampah rumah tangga ke TPS3R dapat berlangsung secara konsisten. Setelah sampai di TPS3R, sampah dipisahkan antara organik dan anorganik guna mempermudah proses pengolahan dan meningkatkan potensi daur ulang. Ketertiban sistem angkut menunjukkan bahwa TPS3R mempunyai pola layanan yang jelas, sementara proses pemilahan merupakan langkah awal dalam menekan jumlah sampah yang dikirim ke TPA. Namun, pemilahan dari sumber belum berjalan maksimal. Banyak warga masih mencampur sampah karena menganggap pemisahan merupakan tanggungjawab petugas TPS3R. Sosialisasi yang dilakukan di awal pembentukan TPS3R tidak lagi dilaksanakan secara rutin, sehingga kesadaran masyarakat perlahan menurun. Sehingga tugas pemilahan lebih banyak dilakukan oleh petugas di TPS3R, padahal keberhasilan program bergantung pada keterlibatan warga dalam memilah sampah sejak dari rumah. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang dilakukan secara rutin dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemilahan dan memperkuat efektivitas program.

Pembinaan SDM menjadi bagian penting dalam menjalankan program. DLHK Kabupaten Sidoarjo melalui TIMSOS secara berkala memberikan pendampingan kepada pengelola TPS3R baik sebelum maupun saat program berlangsung. Pembinaan dilakukan melalui kunjungan lapangan, monitoring, serta pelatihan mengenai pengoperasian mesin, teknis pengelolaan sampah, dan manajemen administrasi. Upaya ini meningkatkan kemampuan petugas dalam menjalankan tugas pengumpulan, pemilahan, serta pengolahan sampah. Selain pembinaan dari pemerintah daerah, sebagian besar pengelola TPS3R di Kabupaten Sidoarjo juga melakukan pembinaan internal kepada

*Corresponding author
E-mail addresses: natasya8124@gmail.com



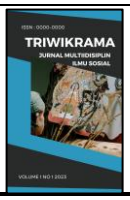
para anggotanya. Bentuk pembinaan ini dilakukan secara mandiri, baik melalui pelatihan praktik di lapangan, studi banding ke lokasi pengelolaan sampah lain yang lebih maju, maupun kegiatan pembinaan non-formal yang bertujuan meningkatkan motivasi dan kedisiplinan kerja. Pembinaan internal tersebut difokuskan pada peningkatan kemampuan operasional petugas, pengetahuan tentang pemilahan dan pengolahan sampah, serta pembentukan sikap kerja yang peduli terhadap kebersihan dan keselamatan kerja. Pemeliharaan sarana dan prasarana merupakan bagian penting dalam memastikan kelancaran pelaksanaan program. Sebagian besar peralatan TPS3R di Kabupaten Sidoarjo masih berada dalam kondisi layak pakai dan dikelola langsung oleh pengurus. Kegiatan pemeliharaan dilakukan melalui pengecekan berkala, pembersihan peralatan, serta perbaikan apabila ditemukan kerusakan ringan. Sumber pendanaan untuk perawatan umumnya berasal dari iuran masyarakat serta pendapatan hasil penjualan sampah terpilah. Pada beberapa TPS3R, pemerintah desa turut memberikan bantuan ketika terjadi kerusakan pada fasilitas tertentu, meskipun dukungan tersebut belum merata di seluruh wilayah. Sementara itu, DLHK tidak menyediakan bantuan perbaikan alat sehingga TPS3R perlu mengandalkan kapasitas internal untuk menjaga sarana tetap berfungsi. Mengingat intensitas penggunaan alat yang tinggi setiap hari, sebagian fasilitas berpotensi mengalami kerusakan lebih cepat, sehingga diperlukan pemeliharaan yang berkesinambungan. Mekanisme perawatan yang teratur memungkinkan proses pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah berlangsung tanpa hambatan.

Secara keseluruhan, evaluasi *process* menunjukkan bahwa pelaksanaan program TPS3R di Kabupaten Sidoarjo telah mengikuti ketentuan teknis yang telah direncanakan. Hal ini mencakup pengelolaan sampah yang tertata, pembinaan SDM yang dilakukan secara berkala, serta pemeliharaan fasilitas yang diupayakan mandiri oleh pengelola. Meskipun demikian, keberhasilan program masih sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, khususnya dalam pemilahan sampah sejak dari rumah. Oleh karena itu, sosialisasi yang dilakukan secara terus-menerus menjadi kunci untuk memperkuat keterlibatan warga dan mendukung upaya pengurangan sampah sebagai lingkungan berkelanjutan.

4) Product

Stufflebeam dan Shinkfield (1985) dalam (Asyraf et al., 2022) menjelaskan bahwa tujuan dari *product evaluation* adalah untuk mengukur, menafsirkan, dan menetapkan pencapaian hasil dari suatu program, memastikan seberapa besar program telah memenuhi kebutuhan suatu kelompok program yang dilayani. Model ini sangat relevan dalam konteks penelitian ini, di mana fokus evaluasi program TPS3R di Kabupaten Sidoarjo tertuju pada tiga aspek utama yaitu capaian pengurangan sampah rumah tangga, produk yang dihasilkan, serta dampak program. Capaian pengurangan sampah rumah tangga memperlihatkan perkembangan yang sejalan dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat nasional dan daerah yang menargetkan penurunan timbulan sampah secara bertahap. Kehadiran TPS3R menjadi instrumen penting untuk mencapai target tersebut karena proses pemilahan dan pengolahan dilakukan langsung di desa.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Tabel 1.1 Capaian dan Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Sidoarjo

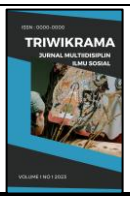
Indikator	Tahun					
	2022		2023		2024	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Pengurangan	28%	25%	29%	37%	29%	33%

Sumber: Diolah dari LKPJ Bupati Sidoarjo

Berdasarkan data, capaian pengurangan sampah menunjukkan variasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, tingkat pengurangan tercatat 25%, sedikit di bawah target tahunan 28%. Pada tahun 2023 capaian meningkat menjadi 37%, dan pada tahun 2024 mencapai 33%, keduanya melampaui target 29%. Angka tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pemilahan dari rumah, pengomposan, daur ulang, serta proses pengelolaan lain mampu menurunkan jumlah sampah yang harus dikirim ke TPA Jabon. Selain pencapaian pengurangan timbulan sampah, evaluasi *product* juga mencakup peninjauan terhadap produk-produk yang dihasilkan TPS3R. Produk tersebut menggambarkan sejauh mana prinsip *reduce*, *reuse*, dan *recycle* telah diterapkan dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Sebagian besar TPS3R sudah melakukan pemilahan sampah anorganik untuk kemudian dijual kembali. Akan tetapi, kemampuan mengolah sampah lebih lanjut tidak merata antara satu TPS3R dengan yang lain. Beberapa TPS3R telah mengembangkan pengolahan sampah organik menjadi kompos atau maggot, sedangkan sebagian lainnya masih terbatas pada aktivitas pengumpulan dan penjualan sampah anorganik yang dinilai lebih mudah dan memiliki nilai ekonomi pasti. Di antara TPS3R tersebut, ada yang mampu mengolah sampah secara menyeluruh sehingga tidak meninggalkan residu, misalnya dengan menghasilkan kompos, maggot, serta memanfaatkan residu menjadi produk seperti paving. Namun demikian, hambatan masih dijumpai terutama dalam pemasaran produk olahan tertentu, seperti hasil kerajinan dari sampah anorganik, karena rendahnya minat masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian produk hanya digunakan untuk kebutuhan internal TPS3R.

Dari sisi dampak, keberadaan program TPS3R membawa pengaruh besar terhadap pengurangan sampah dan perbaikan kualitas lingkungan di tingkat desa. TPS3R dapat membantu menekan jumlah sampah rumah tangga yang dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jabon, karena sebagian besar sampah telah melalui proses pemilahan dan pengolahan sebelum dibuang. Sebelum program ini diterapkan, sampah biasanya langsung dibuang ke TPA tanpa dipilah terlebih dahulu. Setelah TPS3R berjalan, sampah yang diterima akan dipilah antara organik dan anorganik, lalu sebagian besar dapat diolah dan dimanfaatkan kembali. Dampak lain yang muncul ialah manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Pendapatan dari hasil penjualan sampah pilahan digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional TPS3R serta memberikan penghasilan bagi petugas

*Corresponding author
E-mail addresses: natasya8124@gmail.com



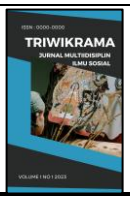
TPS3R. Pada beberapa TPS3R, jumlah tenaga kerja juga mengalami peningkatan, menunjukkan bahwa aktivitas pengelolaan sampah mampu membuka peluang kerja baru serta menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat. Meskipun berbagai dampak positif telah muncul, masih terdapat efek lingkungan yang perlu diperhatikan, seperti munculnya bau yang terkadang dirasakan warga, khususnya pada musim hujan. Permasalahan bau tersebut dapat diatasi melalui penyemprotan penghilang bau, situasi ini menunjukkan pentingnya pemeliharaan lingkungan yang lebih intensif serta respon cepat terhadap mengatasi keluhan masyarakat. Secara keseluruhan, hasil evaluasi pada aspek *product* memperlihatkan bahwa program TPS3R di Kabupaten Sidoarjo memberikan kontribusi signifikan dalam menurunkan volume sampah rumah tangga, menghasilkan berbagai produk bernilai guna, serta memberikan dampak penting bagi kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Program ini bukan hanya membantu mengurangi beban TPA, tetapi juga memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan lingkungan berkelanjutan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Program TPS3R di Kabupaten Sidoarjo merupakan implementasi nyata dari kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang berorientasi pada prinsip lingkungan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*), dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan program telah berjalan cukup efektif, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang. Dalam aspek *context*, program TPS3R memiliki dasar hukum yang kuat dan tujuan yang selaras dengan kebijakan nasional, yaitu mengurangi timbulan sampah serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Namun, belum semua desa memiliki peraturan desa yang mengatur pengelolaan sampah secara khusus. Pada aspek *input*, pelaksanaan program didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup memadai, meskipun tingkat kualitas dan kelengkapannya berbeda di setiap TPS3R. Sumber daya manusia pengelola telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya, namun masih adanya SDM yang mengelola TPS3R merangkap tugasnya sebagai manajerial dan teknis. Sistem pembiayaan berjalan melalui iuran masyarakat, dana desa, dan hasil penjualan sampah, tetapi keberlanjutan finansial masih bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah desa. Dari aspek *process*, kegiatan pengelolaan sampah di TPS3R sudah berjalan sesuai prosedur yang mencakup pengangkutan, pemilahan, dan pengolahan sesuai prinsip 3R. Namun, tingkat partisipasi masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya masih rendah. Pembinaan SDM yang dilakukan oleh TIMSOS DLHK dan internal oleh pengelola TPS3R telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kapasitas teknis dan kelembagaan. Mekanisme pemeliharaan sarana dan prasarana juga berjalan optimal, meskipun sebagian besar masih dilakukan secara mandiri oleh pengelola dengan keterbatasan dana dan kemampuan teknis. Dalam aspek *product*, program TPS3R di Kabupaten Sidoarjo telah menunjukkan hasil positif berupa pengurangan volume sampah rumah tangga yang signifikan, peningkatan kebersihan lingkungan, serta terciptanya nilai ekonomi baru melalui pemanfaatan kembali sampah menjadi kompos,

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



maggot, dan kerajinan daur ulang, serta terciptanya dampak sosial ekonomi bagi masyarakat melalui lapangan kerja baru.

Saran

a. Pemerintah Desa Kureksari dan Desa Kalanganyar segera menyusun dan menetapkan Peraturan Desa yang mengatur tentang pengelolaan sampah agar pelaksanaan program memiliki landasan hukum yang jelas dan mendukung keberlanjutan operasional TPS3R;
b. Pemerintah Desa Kureksari diharapkan mengalokasikan dana desa untuk mendukung biaya operasional dan pemeliharaan sarana agar tidak sepenuhnya bergantung pada iuran masyarakat;
c. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo melaksanakan sosialisasi yang melibatkan langsung masyarakat, seperti lomba kebersihan lingkungan dan pelatihan daur ulang di tingkat RT/RW agar pesan lebih mudah dipahami dan diterapkan;
d. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dapat membantu memperluas akses pemasaran produk hasil TPS3R.

5. DAFTAR PUSTAKA

Adhi Baskoro Patria, K. B. (2021). Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, *9*(2).

Anju Ferson Tampubolon, Y. H. A. S. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sedati Sidoarjo. Jurnal Penelitian Administrasi Publik, *3*(2). https://doi.org/https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/998

Bupati Sidoarjo. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, *71 (2019)*.

Dr. Asyraf Suryadin, M. Pd. , W. P. S. M. P. N. M. Pd. (2022). Evaluasi Program Model CIPP *(Context, Input, Process, And Product)* Antara Teori Dan Praktiknya (Alviana C, Ed.). Samudera Biru (Anggota IKAPI).

Lutfia Diva Rahmawati, & Ghulam Maulana Ilman. (2023). Proses *Collaborative Governance* Dalam Program Pengurangan Sampah Di TPA Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Media Administrasi, 8(2), 29–42. https://doi.org/10.56444/jma.v8i2.1164

Pardosi, I. P., Nugroho, R., Tata, A., Laboratorium pendidikan luar sekolah, U. :, Gedung O-1 Lantai, F., & Kodepos, J. S. (2019). Pengelolaan Sampah Melalui Recycle Untuk Kemandirian Masyarakat Di Kelurahan Sekardangan Kebupaten Sidoarjo. Pendidikan Untuk Semua. https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpls/index

Salsabila, H. N., Hartono, S., Radjikan, D., & Si, M. (2024). Implementasi Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Dalampenanganan Sampah Di Kota Sidoarjo Jawa Timur. Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 4(05). https://doi.org/10.69957/praob.v4i05.1640

Suryani, S. (2022). *Domestic Waste Management Based on Collaborative Governance in Pekanbaru City*. *Journal of Governance*, *7*(3). https://doi.org/10.31506/jog.v7i3.16364

Widyastutie, M., Kadar, I., & Wahyuni, S. (2021). Evaluasi Program Tps 3r *(Reduce, Reuse, Recycle)* Dalam Rangka Pengurangan Sampah Di Kota Sukabumi.

*Corresponding author
E-mail addresses: natasya8124@gmail.com